

**Wawasan**  
**Halaman 8**  
**Edisi Rabu, 4 Maret 2015**

## 412 Desa Terancam Tak Diberi Dana Bankeu

**SEMARANG** - Sebanyak 412 desa di 19 kabupaten di Jateng belum mengumpulkan surat pertanggungjawaban (Spj) dana bantuan keuangan (Bankeu) desa 2014. Mereka terancam tak mendapatkan dana Bankeu pada 2015 jika akhir Maret mendatang tak tertib mengumpulkan Spj.

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Bappermasdes) Jateng Tavip Supri-yanto mengatakan, jumlah desa yang sudah menyerahkan Spj hanya 94,27 persen dari total 7.809 desa, sehingga Spj yang masuk mencapai 7.397 desa. Diharapkan, desa yang belum mengumpulkan Spj segera menyusun laporannya lantaran batas toleransi sudah mendekati *deadline*.

"Dalam pergub yang baru, nomor 2 tahun 2015 kita atur, desa yang tidak melaporkan pertanggungjawabannya 2014,

itu tidak akan dicairkan dalam mendapatkan bankeu 2015," ungkap Tavip usai melakukan sosialisasi Bankeu Dana Desa di gedung Gradikha Bakti Praja, Selasa (3/4).

Dalam bantuan kali ini, lanjutnya, pemerintah Jateng memberikan bantuan desa untuk tiga kategori. Kategori pertama yakni desa pemula mendapatkan Rp 50 juta, dan desa prakarsa Rp 40 juta. Sementara, desa rintisan model berdikari mendapatkan bantuan Rp 100 juta. "Desa berdikari tahun ini ada 45 desa," timpal Tavip.

Tavip mengatakan, sejauh ini memang ada laporan penyalahgunaan dana Bankeu desa. Dalam pengawasan yang dilakukan, terdapat penyelewengan dana di 12 desa yang dilaporkan melalui situs 'lapor gub'. Namun, permasalahan tersebut sudah

diselesaikan pihaknya melalui pendekatan, sehingga tak sampai masuk di ranah hukum.

Masalah penyelewengan bukan menjadi kendala utama dalam pelaksanaan implementasi dana desa. Masalah yang krusial yakni sulitnya menggerakkan potensi sumber daya manusia di desa untuk membuat Spj dan segera menggunakan dana usai diterima di desa. "Dalam sosialisasi sudah diberi contoh, diberi Pergub dan SK Gubernur. Kita juga ada tim di masing-masing kecamatan dan sudah memulai (merencanakan penggunaan dana)," imbuhnya.

Kebanyakan penggunaan dana bankeu desa di 2014, kata Tavip, yakni untuk pembuatan beton sebanyak 38 persen, pembuatan talud 28 persen, drainasi 9 persen, dan aspal jalan 9 persen, serta pembuatan gorong atau

jembatan 7 persen. "Mereka juga ada dana swadaya yang mencapai Rp 90,1 miliar di 2014. Sedang dari kami Rp 435 miliar," terangnya.

Dana Bankeu desa 2015, terang Tavip, akan dikucurkan sebesar Rp 334,3 miliar untuk 7.764 desa, dan masing-masing Rp 100 juta untuk 45 desa berdikari.

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo menambahkan, indikasi penyelewengan dana desa untuk kepentingan pribadi akan diselidiki. "Makanya kita hadirkan Jaksa di sini," terang Politikus PDIP itu.

Gubernur menyayangkan, pelaporan Spj masih belum terlaksana dengan baik. Pihak Pemprov Jateng akan tetap menagih Spj tersebut. "Kalau tidak nanti akan diperiksa BPK (Badan Pemeriksa Keuangan)," tutupnya. ■ *M9-yan*